

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, masing-masing daerah dieajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional;
 - b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MATARAM TAHUN
2005-2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan.

BAB II

MAKSUD RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimaksudkan sebagai dokumen politik yang wajib menjadi pedoman dan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Penutup.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun setiap 5 (lima) Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dan akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta harus ditinjau kembali sesuai dinamika dan aspirasi masyarakat.

Pasal 7

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan dan hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 25 November 2008
WALIKOTA MATRAM,

Ttd

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada Tanggal 25 November 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

Ttd

H.L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 31 Agustus 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531) merupakan Daerah otonom yang mengalami peningkatan status dari Kota Administrasi yang sebelumnya dibawah Wilayah Pemerintah kabupaten Lombok Barat menjadi Kota.

Dalam kurun waktu sejak berdiri sampai dengan tahun 1993, Pemerintah Kota Mataram telah menyusun program pembangunan jangka pendek satu tahun (Rapetada) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka waktu tahunan, jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Mataram dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram untuk jangka waktu lima tahunan, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Mataram yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 cukup terdiri dari 8 (delapan) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimaksudkan untuk memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Mataram dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kota Mataram terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda Kota Mataram menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut Bappeda Kota Mataram menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2008

1.1 Latar Belakang

Kota Mataram dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531), merupakan peningkatan status Kota Administratif Mataram dibawah wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kurun waktu sejak berdiri sampai dengan tahun 1998 Pemerintah Kota Mataram telah menyusun program pembangunan jangka pendek satu tahunan (Repetada), program pembangunan jangka menengah lima tahunan yaitu berupa Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada dua tahun terakhir Repelita (1997-1998), sebagaimana halnya kondisi nasional; masyarakat Kota Mataram juga mengalami dampak dari krisis politik yang terjadi. Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih menekankan pada Otonomi Daerah dan bidang perencanaan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Sesuai dengan aturan tersebut, Pemerintah Kota Mataram dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, telah berhasil menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Mataram Tahun 2001 – 2005 yang memuat arah kebijakan dan program pembangunan secara lebih terinci dan terukur.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, serta Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi, menjamin konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta disusun secara berjangka yaitu meliputi jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Mataram Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Mataram yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kota Mataram Tahun 2007-2027 dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama, menganalisis kondisi daerah mulai dari geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana serta pemerintahan yang diperoleh dari data sekunder dan penggalian informasi melalui diskusi group terfokus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan target group yang berbeda untuk topik masing - masing.

Tahapan kedua, menyusun prediksi kondisi umum daerah Kota Mataram periode waktu 20 tahun, tahun 2005 – 2025 yang dirumuskan kedalam rancangan visi, misi dan arah kebijakan selama 20 tahun kedepan yang dilakukan melalui konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat. Penjangkaran aspirasi masyarakat dalam perumusan visi dan misi Kota Mataram Tahun 2005 – 2025, dilakukan melalui berbagai media massa seperti koran, radio, spanduk, penyebaran kuisisioner , short message services (SMS). Aspirasi masyarakat tersebut kemudian dianalisis dalam focus group discussion (FGD) dengan berbagai terget group yang berbeda-beda meliputi group tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama ; group akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemuda ; serta group praktisi birokrasi.

Tahapan ketiga, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah Kota Mataram sebagai forum konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan untuk mendapatkan rumusan hasil dan komitmen.

Tahap keempat, penyusunan rancangan akhir RPJP daerah Kota Mataram tahun 2005 – 2025 dan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang RPJP daerah Kota Mataram tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kota Mataram untuk proses penetapan Peraturan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Mataram Tahun 2005 – 2025 disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Mataram dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram ini akan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Kota Mataram untuk jangka waktu lima tahunan, melalui serangkaian forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJP Kota Mataram disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM.
2. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh kedepan untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi dan proyeksinya.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program lima tahun daerah.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJP Kota Mataram Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

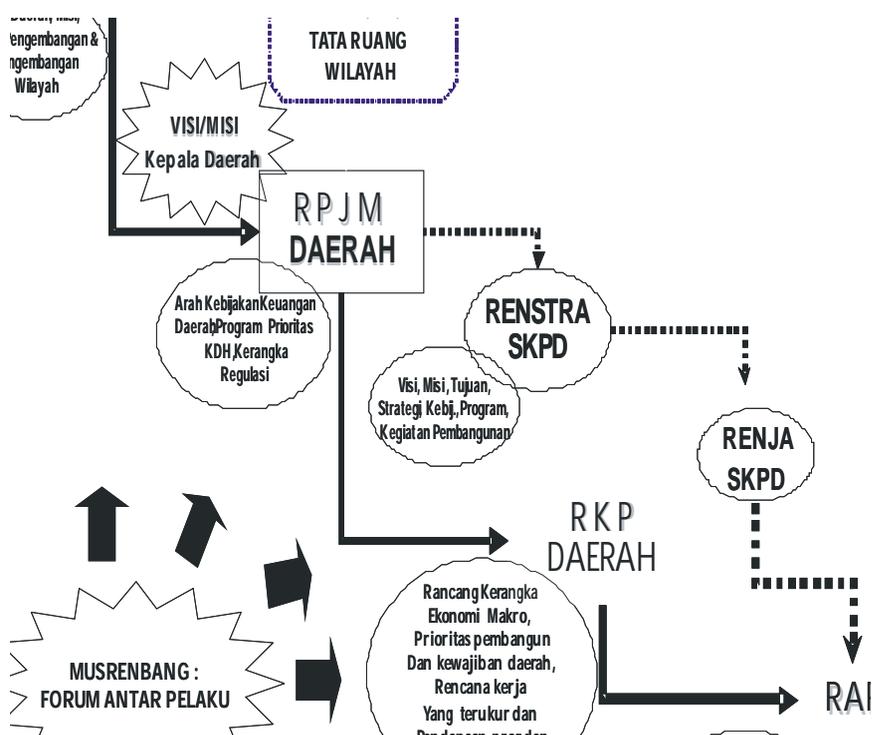
- o Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.
- o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- o Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- o Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- o Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2002/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

- o Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi NTB.
- o Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJP Daerah Kota Mataram Tahun 2005–2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

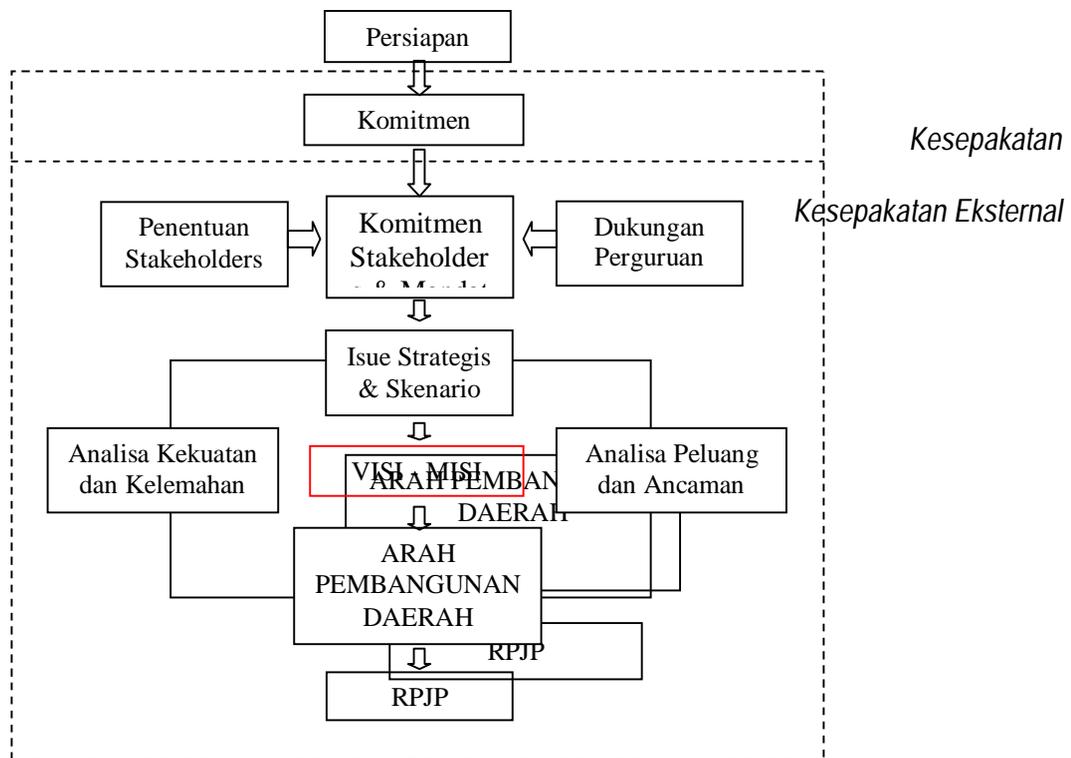
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Mataram Tahun 2005–2025 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Mataram Tahun 2005–2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Mataram untuk jangka waktu 5 tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Mataram Tahun 2005 – 2025 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2006-2026.



Gambar 1.

Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk memudahkan pemahaman substansi dasar dari RPJP Kota Mataram ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2.
Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJP Kota Mataram

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJP Kota Mataram, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi dan analisis geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, pemerintahan dan serta

informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting. Selain itu bab ini juga menguraikan tentang prediksi kondisi umum daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah.

1. Visi (untuk jangka waktu 20 tahun).
2. Misi (untuk jangka waktu 20 tahun dan yang akan dijabarkan untuk setiap jangka waktu lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
3. Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah.

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**2.1. KONDISI DAN ANALISIS****2.1.1 Geomorfologi**

1. Secara umum kondisi geomorfologi Kota Mataram relatif datar, ketinggian dari permukaan laut dibagi ke dalam tiga kelas yaitu daerah rendah (r) dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut, daerah menengah (m) dengan ketinggian 100–500 meter dari permukaan laut dan daerah tinggi dengan ketinggian >500 meter. Keadaan topografi yang dimaksud di sini berhubungan dengan bentuk lahan dan kelerengan. Bentuk lahan secara makro dibagi menjadi dataran, berbukit, dan bergunung. Secara mikro bentuk lahan dan kemiringan lereng memiliki hubungan sebagai berikut: datar (0 - 2%), landai (3 - 8%), bergelombang (9 - 15%) agak curam (16% - 30%) curam (31 - 50%) dan sangat curam >50%. Wilayah Kota Mataram sebagian besar merupakan dataran rendah, sedang dan sisanya sebelah utara merupakan dataran pegunungan dan perbukitan. Secara keseluruhan topografi Kota Mataram berada pada ketinggian di bawah 50 m dpl dengan selang ketinggian sejauh 9 km. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram bagian barat berada pada ketinggian topografi 0-8 %, sedang bagian timur Kecamatan Cakranegara agak tinggi dan relief tidak datar dengan ketinggian antara 10-15 %. Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai ± 25 m, Kecamatan Mataram ± 15 m dan Kecamatan Ampenan ± 5 m dari permukaan laut termasuk daerah pantai.
2. Struktur lithologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari hasil letusan Gunung Rinjani. Secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan dibawahnya terdapat lapisan pasir.
3. Kota Mataram merupakan daerah yang beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata mencapai 26°C dengan kelembaban udara rata-rata mencapai 80 persen per tahun. Suhu udara akan meningkat apabila terjadi pemanasan global karena dipengaruhi oleh iklim makro.

4. Suhu udara Kota Mataram tidak berbeda jauh dengan suhu daerah tropis lainnya di Indonesia yaitu berkisar antara 20,4° C sampai dengan 32,10° C. dengan kelembaban maximum 92 persen terjadi pada bulan Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembaban minimum 67 persen terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran matahari maximum pada bulan Juli 83 % dan kecepatan angin maximum rata-rata terjadi pada bulan Pebruari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi bulan November 27 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110 hari/tahun.

2.1.2. Demografi

1. Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa mendorong terjadinya migrasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Mataram, diikuti dengan Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara. Bila dilihat dari kecepatan pertambahan penduduk, maka penurunan laju pertambahan penduduk Kecamatan Ampenan lebih cepat dibandingkan dengan Kecamatan Mataram maupun Kecamatan Cakranegara.
2. Piramida kependudukan dalam kurun 10 tahun terakhir menunjukkan penduduk usia muda 0 – 24 tahun sebesar 49,99 persen, kelompok usia 25 - 59 tahun sebesar 43,41 persen, dan 60 tahun ke atas sebesar 6,9 persen. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki.
3. Presentase penduduk lanjut usia umur 65 tahun ke atas terus meningkat selama periode 1990 - 2006. Peningkatan penduduk lansia ini terkait dengan peningkatan usia harapan hidup. Data statistik menunjukkan bahwa harapan hidup di Kecamatan Mataram adalah yang terbesar yaitu 72,67, diikuti oleh Kecamatan Cakranegara sebesar 68,6 dan Kecamatan Ampenan sebesar 67,93.

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Perekonomian Kota Mataram periode 1991 – 2006 menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti dimana laju pertumbuhan selama periode tersebut atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,97 persen. Dalam kurun waktu tersebut, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003, dimana pertumbuhannya sebesar 10,23 persen. Sharing yang

terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Mataram didominasi oleh sektor perdagangan, transportasi dan jasa.

2. Pendapatan perkapita Kota Mataram periode 1993 – 2005 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Distribusi pendapatan Kota Mataram dapat dikategorikan ketimpangan rendah karena 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 20,27 persen dari pendapatan. Berdasarkan kriteria Gini Index, Kota Mataram tergolong tingkat distribusi pendapatan ketimpangan rendah karena memiliki Gini Index sebesar 0,3.
3. Laju inflasi Kota Mataram selama periode 1993–2005 berfluktuasi. Laju inflasi Kota Mataram pada tahun 1993 sebesar 9,18 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 21,83 persen yang berimplikasi terhadap turunnya daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak bisa dilakukan dengan baik. Laju inflasi ini dapat diturunkan secara bertahap walaupun pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 17,72 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang mencapai 40,38 persen. Sebagai konsekuensinya, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.
4. Keberhasilan perekonomian Kota Mataram belum dapat menyelesaikan pengangguran dan inflasi secara penuh. Hal ini dapat kita lihat dari dependensi ratio dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Mataram pada tahun 2006 masing-masing sebesar 50,14 dan 55,25.
5. Perusahaan perdagangan Kota Mataram dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Jumlah perusahaan perdagangan menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Hal ini didorong oleh kegiatan perdagangan di Kota Mataram yang menunjukkan trend positif. Kondisi ini didukung oleh adanya fasilitas dan aksesibilitas yang memadai seperti terminal antar provinsi, bandara, sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan, serta aksesibilitas lainnya sehingga mendorong mobilitas penduduk, barang-barang konsumsi, dan investasi. Semua elemen tersebut memberikan *resutante* terhadap kemajuan perdagangan di Kota Mataram.
6. Industri di Kota Mataram sebagian besar berupa industri kecil dan industri rumah tangga. Dalam 10 tahun terakhir jumlah industri di Kota Mataram mengalami peningkatan demikian juga dengan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Perkembangan sektor industri ini sebagai salah satu penunjang kegiatan pariwisata yang dibingkai dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang berbasis masyarakat.
7. Pembangunan Koperasi dan UKM menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah koperasi, jumlah anggota, asset

dan volume usaha. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan UKM melalui keterpaduan program antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kelembagaan, dan bantuan permodalan.

8. Perkembangan pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Perkembangan ini didukung oleh adanya peninggalan-peninggalan sejarah serta letak Kota Mataram yang sangat strategis, yaitu sebagai salah satu pintu masuk tujuan wisata ke Pulau Lombok disamping merupakan lokasi yang dilalui dalam menuju daerah wisata di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
9. Pola pemanfaatan ruang meliputi Rencana Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Dalam pemanfaatan ruang ini telah terjadi pergeseran peruntukan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota hal ini akibat aktivitas pembangunan masyarakat dan sebagai konsekuensi Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi, pusat pemerintahan perdagangan dan jasa. Dengan menginduk kepada kecenderungan perkembangan penduduk di masa mendatang, maka pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) di Kota Mataram ini meliputi Wilayah Pengembangan (WP) dengan beberapa sub pusat Wilayah Pengembangan (WP). WP I (Bagian Barat Kota Mataram), WP II (Bagian Tengah Kota Mataram), dan WP III (Bagian Timur Kota Mataram).
10. Sumber daya alam yang dimiliki meliputi sumber daya lahan, sumber daya air, perikanan dan kelautan. Dalam pemanfaatan sumber daya lahan telah terjadi pengurangan daerah pertanian sekitar 1,6% per tahun akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan fasilitas publik. Untuk sumber daya air terdapat empat daerah aliran sungai, yakni Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Ancar dan Sungai Brenyok.
11. Penggunaan lahan mengalami alih fungsi yang cukup signifikan dari lahan pertanian, kawasan hijau dan daerah tangkapan air (*catchment area*) menjadi permukiman, perdagangan dan perkantoran. Alih fungsi lahan tersebut membawa dampak terhadap struktur tata ruang kota serta daya dukung lahan dan lingkungan hidup lainnya.
12. Kondisi sumber daya air di Kota Mataram berkurang, karena adanya efek kerusakan lingkungan kawasan di daerah hulu (hutan Rinjani) dan pembangunan di Kota Mataram. Hal ini ditandai dengan berkurangnya sumber mata air di beberapa kawasan dan berkurangnya debit air pada beberapa sungai di Kota Mataram. Dan sebagai akibat dari penutupan daerah serapan air

akibat pesatnya perkembangan fisik kota yang berkisar antara 5 – 7 persen setiap tahun.

13. Air sungai dan air tanah di Kota Mataram terindikasi terjadi pencemaran di beberapa tempat sebagai akibat eksploitasi dan intervensi manusia yang terus meningkat pada kawasan Industri, kawasan pemukiman perkotaan dan daerah aliran sungai. Kondisi abrasi juga telah terindikasi di beberapa kawasan pesisir pantai di Kota Mataram

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik

1. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik yang antara lain, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70.91 pada tahun 2006. Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup (65,8 tahun), angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar (91,8 %) dan pendidikan menengah (62,05 %), serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli sebesar Rp.652.581,-. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram menempati urutan ke-208 dari 456 kabupaten/kota di Indonesia.
2. Status kesehatan masyarakat secara umum masih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan kesehatan masyarakat daerah lainnya, yang ditandai antara lain dengan masih tingginya angka kematian bayi, yaitu 42,89 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih menjadi masalah dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.
3. Kondisi pendidikan masih dihadapkan pada belum tuntasnya program Wajib Belajar 9 Tahun yang ditandai masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang baru dapat mencapai 8,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Tingginya angka putus sekolah terutama pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA merupakan indikator masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat. Disparitas taraf pendidikan masyarakat miskin dengan masyarakat menengah keatas diupayakan oleh pemerintah dengan membebaskan biaya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat terpenuhi hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Masih tingginya angka buta aksara diupayakan dengan mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap lingkungan untuk memberikan pendidikan bagi penduduk usia 15 tahun keatas yang belum melek aksara.

4. Masyarakat Kota Mataram merupakan masyarakat yang heterogen baik suku, budaya maupun agama. Mayoritas masyarakat beragama Islam (81,4%) disamping penganut agama Hindu (15,3%), Katolik (0,95%), Protestan (1,15%), Budha dan lainnya (1,2%). Suku Sasak sebagai suku asli Pulau Lombok hidup berdampingan dengan suku lainnya seperti Suku Bali, Samawa, Mbojo, Jawa dan lainnya. Namun demikian suasana kehidupan keseharian masyarakat sangat harmonis, baik dari intern umat beragama maupun antar umat beragama.

2.1.5. Prasarana dan Sarana

1. Air Bersih

- a. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, penduduk menggunakan air bersih hasil produksi PDAM dengan mengoptimalkan sumber air yang berasal dari tiga mata air yaitu mata air Sarasuta dengan debit 300 liter/detik, Saraswaka 200 liter/detik, dan Ranget 1640 liter/detik. Dari ketiga sumber mata air tersebut potensi yang terpakai 601 liter/detik terdiri dari Sarasute 111 liter/detik, Saraswaka 93 liter/detik dan mata air Ranget 397 liter/detik. Dari potensi yang dimanfaatkan, potensi air baku masih cukup besar.
- b. Jumlah pelanggan PDAM di Kota Mataram saat ini sekitar 59,63 persen (212.806 jiwa) dengan total pemakaian air sekitar 1.075.802 m³. Antara bulan April 2005 s/d April 2006.
- c. Kebutuhan air bawah tanah, khusus air tanah dalam dimanfaatkan oleh beberapa hotel dan industri, sedangkan air tanah dangkal digunakan untuk air minum penduduk yang mencapai sekitar 40,37 persen dari total penduduk.

2. Drainase

- a. Sistem drainase sesuai fungsi pelayanan dibedakan menjadi drainase utama (*major drainase*) dan drainase lokal (*minor drainase*). *Major drainase* memanfaatkan 4 sungai besar yaitu Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Midang, sedangkan *minor drainase* menggunakan saluran buatan yang melayani kawasan-kawasan tertentu yaitu perumahan, industri, komersial dan lain-lain.
- b. *Major drainase* mengalirkan air hujan ke DAS dan menerima air hujan dari drainase lokal dengan kondisi fisik Sungai Jangkok panjang aliran ± 86 Km dan luas DAS ± 226 Km²; Sungai Ancar panjang aliran 21 Km dengan luas

DAS ± 63 Km² ; Sungai Brenyok panjang aliran 42 Km dan luas DAS 56,77 Km² dan Kali Midang panjang aliran ± 26 Km dan luas DAS ± 62 Km².

- c. Drainase lokal sebanyak 45 buah saluran dengan panjang saluran 102,48 Km yang meliputi saluran primer 31,00 Km, saluran sekunder 31,80 Km dan saluran tersier 37,68 Km dengan *outline plan* sistem gravitasi, sistem sudetan, dan sistem penggelontoran yang berasal dari saluran irigasi yang dikarenakan saluran drainase juga ada yang berfungsi sebagai saluran irigasi.
- d. Perubahan tata guna lahan akibat semakin pesatnya pembangunan fisik berdampak pada perubahan sifat tanah yang sebelumnya lolos air (*permeable*) menjadi bersifat kedap air (*impermeable*). Kondisi ini sering ditunjukkan dengan fenomena luapan air (*overtapping*) dari saluran drainase yang memenuhi jalan-jalan perkotaan, sehingga terjadi banjir dan/atau aliran air sepanjang jalan di Kota, maupun genangan-genangan yang sangat mengganggu aktivitas warga kota sehari-hari terutama daerah yang memiliki kemiringan yang landai dengan kisaran 0 – 15 persen. Kondisi ini diperburuk dengan adanya sedimentasi pada saluran drainase dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran.

3. Air Limbah dan Sanitasi

- a. Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja (IPLT) masih menggunakan sistem *on site* (*septic tank*), dimana 60% rumah tangga memiliki *septic tank* tanpa peresapan. Sedangkan pengolahan limbah dengan sistem *off site* (perpipaan) masih dalam fase uji coba, dimana saat ini belum dapat dioperasikan secara optimal.
- b. Berdasarkan asal buangan air limbah dibagi atas dua kategori yaitu air limbah yang berasal dari domestik/rumah tangga dan air limbah dari kegiatan industri dan perdagangan yang mengandung unsur kimia yang cukup beragam dan terkadang berwarna dan bahkan mengandung unsur Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
- c. Pengolahan limbah industri, limbah rumah sakit dan limbah hotel, sebagian sudah melakukan treatment sendiri dengan membangun sistem pengolahan air limbah sendiri sebelum dibuang ke badan sungai sehingga resiko bahaya relatif kecil.
- d. Kualitas Udara Ambien secara umum masih dibawah baku mutu, akan tetapi parameter kebisingan dan buangan timah hitam telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan;

4. Transportasi

a. Transportasi Darat

- 1) Secara umum prasarana jalan sudah cukup memadai dan dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dari panjang ruas jalan 352.851 km yang ada, sepanjang 38,37 km jalan nasional 100 persen dalam keadaan baik; jalan provinsi sepanjang 47,18 Km, 100 persen dalam kondisi baik dan jalan kota 267,301 Km dalam kondisi baik 31,12 persen (83,186 Km), kondisi sedang 67,56 persen (180,580 Km) dan dalam kondisi rusak 1,32 persen (3,535 Km)
- 2) Untuk menunjang pergerakan dan mobilitas penduduk terdapat moda transportasi umum berupa Bemo Kota, Taxi, Ojek dan angkutan tradisional Cidomo yang menghubungkan pusat wilayah yang satu dengan pusat wilayah yang lainnya. Begitu juga dengan keberadaan terminal baik regional maupun lokal. Terminal yang ada saat ini yaitu Terminal Regional Tipe A di Bertais dan terminal Tipe C di Kebon Roek yang belum berfungsi secara optimal.
- 3) Kondisi sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar sistem transportasi dalam kota dilengkapi dengan rambu-rambu jalan, marka jalan, marka parkir dan traffic light. Kondisi traffic light yang ada relatif masih kurang terutama pada jam-jam sibuk pada ruas jalan tertentu.

b. Transportasi Laut

Setelah pelabuhan laut Ampenan dipindahkan ke Lembar Kabupaten Lombok Barat, tidak terdapat lagi layanan transportasi laut melalui wilayah Ampenan.

c. Transportasi Udara

Kondisi Bandar Udara Selaparang sebagai salah satu sarana transportasi udara masih cukup baik dan memadai serta memenuhi syarat untuk didarati pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 737- 400, luas areal Bandar Udara Selaparang saat ini 547,76 Ha dengan runway 2.100 x 40 M, dimana 12,41 persen berada dibawah otoritas PT. Angkasa Pura. Jumlah penumpang pada

tahun 2006 sebanyak 843.921 orang dengan rincian 791.924 penumpang domestik dan 51.997 penumpang internasional.

5. Prasarana dan Sarana Irigasi

- a. Prasarana yang ada berupa saluran sepanjang 53.146 Km, masih mampu mengairi areal persawahan seluas 1.583 Ha. Fungsinya belum optimal karena saluran irigasi yang ada sebagian sudah beralih fungsi menjadi saluran drainase, dan sebagian besar saluran telah mengalami pendangkalan akibat proses sedimentasi yang cukup tinggi.
- b. Pembangunan prasarana dan sarana irigasi dalam 10 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang berarti karena kondisi yang ada masih cukup memadai, untuk mengairi areal persawahan yang setiap tahun mengalami pengurangan.

6. Kelistrikan

Pelayanan listrik berasal dari PLTD Ampenan dengan kapasitas 408.663.983 KWH dan yang disalurkan sebanyak 387.572.427 KWH. listrik yang terjual sebesar 343.723.385 KWH dengan jumlah pelanggan sebanyak 205.784 unit.

7. Pos dan Telekomunikasi

- a. Jumlah sambungan telpon 27.904 SST, Warung Telekomunikasi (Wartel) 399 SST, telepon umum koin 135 SST. Fasilitas komunikasi terdiri dari layanan jasa telepon tetap, layanan telepon bergerak dan layanan internet, yang dilayani oleh perusahaan swasta maupun BUMN.
- b. Jumlah Kantor Pos di Kota Mataram sebanyak 10 buah yang terdiri dari kantor pos kelas IV, IX dan X, termasuk kantor pos *extension* dan pos keliling kota.
- c. Jasa pengiriman lewat Kantor Pos di Kota Mataram masih cukup tinggi baik pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Perencanaan telepon mengarah pada target perencanaan jangka pendek dan menengah, karena perkembangan teknologi telekomunikasi sangat cepat, sehingga tidak dapat diprediksi.

8. Permukiman

- a. Kebutuhan perumahan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada akhir tahun 2005 luas lahan perumahan sekitar 2.869, 15 Ha terbangun telah mencapai 46,80 persen yang menampung penduduk sebanyak 356.748 jiwa. Untuk mencapai tingkat pelayanan dan kebutuhan akan rumah maka diharapkan 80 persen kebutuhan rumah dapat dibangun

oleh masyarakat sendiri dan 20 persen dapat dibangun melalui peran serta dunia usaha/developer, sedangkan pemerintah dapat menyediakan prasarana dan sarana pendukung.

- b. Dikawasan-kawasan yang belum terbangun dan diperuntukan bagi perumahan dan permukiman di arahkan untuk pengaturan yang baik dan terpola, perlu ditata melalui program kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- c. Masih terdapat rumah darurat yang kurang sehat dan tidak layak huni mencapai sekitar \pm 11 persen yang terus ditingkatkan kualitas lingkungannya dengan berbagai program pemerintah. Pemerintah telah memberikan dana stimulan di masing-masing kelurahan untuk perbaikan dan peningkatan kondisi lingkungannya.
- d. Dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram berdampak pula pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang layak. Hal tersebut berimplikasi pada munculnya permukiman kumuh (*slum*) dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Di Kota Mataram masih terdapat beberapa kelurahan tertinggal, dan permukiman kumuh. Pada tahun 2005 di Kecamatan Mataram luas permukiman kumuh mencapai 20 Ha, di Kecamatan Ampenan mencapai 20 Ha dan di Kecamatan Cakranegara mencapai 40 Ha.

9. Persampahan

- a. Dengan jumlah armada yang terbatas dan SDM yang kurang memadai, luas dan jangkauan pelayanan sampah di Kota Mataram saat ini adalah sekitar 82,6 persen atau 19 kelurahan dari 23 kelurahan dengan luas \pm 5.026,6 Ha serta jumlah penduduk terlayani sekitar 260.935 jiwa. Total timbulan sampah/hari mencapai 1.020 m³ dengan jumlah timbangan sampah terangkut ke TPA sekitar 76,37 persen (779 m³/hari). Timbulan sampah berasal dari pemukiman, pasar komersil, perkantoran, fasilitas umum, sampah jalan, kawasan industri, saluran/deainase dan lain-lain
- b. Lokasi TPA Kebon Kongok saat ini dari TPA lokal seluas 8,6 Ha sudah beralih fungsi menjadi TPA Regional seluas \pm 20 Ha dengan tambahan areal seluas 11,4 Ha. TPA Kebon Kongok merupakan TPA dengan sistem pengelolaan *sanitary landfill*, yang telah dilengkapi sarana penampungan air lindi dan sistem pelepasan gas metan serta sarana pendukung lainnya.

10. Fasilitas Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di dukung dengan sarana kesehatan antara lain Rumah Sakit Umum 5 unit; Rumah Sakit jiwa 1 Unit; Rumah Sakit Bersalin 6 unit; Puskesmas 8 Unit; puskesmas Keliling 8 Unit; Puskesmas Pembantu 17 Unit; dan Polindes sebanyak 15 Unit. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan kesehatan di Kota Mataram terdapat 63 Apotek dan 26 Toko Obat.

11. Fasilitas Pendidikan

- a. Fasilitas pendidikan untuk saat ini adalah TK 120 unit; SD 162 unit; SMP 71 unit; SMU 43 unit , 3 unit Perguruan Tinggi Negeri dan 19 unit Perguruan Tinggi Swasta. Letak fasilitas pendidikan menyebar, sehingga memudahkan penduduk untuk mencapainya.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, telah dibangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai umumnya dan secara khusus dibangun sekolah percontohan pada masing-masing kecamatan. Selain itu dibangun gedung-gedung sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mataram akan pelayanan pendidikan.

2.1.6. Pemerintahan

1. Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Mataram sampai dengan saat ini terdiri dari 12 Dinas, 5 Badan, 9 Kantor, 1 Sekretariat Daerah dan 1 Sekretariat DPRD. Namun jumlah organisasi tersebut mengalami perubahan, hal ini dapat terjadi karena pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur agar organisasi yang terbentuk lebih ramping namun kaya fungsi dan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
2. Pada tahun 2007, dilakukan pemekaran wilayah untuk kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram. Sebelumnya, kecamatan berjumlah 3 kecamatan, sedangkan kelurahan berjumlah 23 kelurahan. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2007, wilayah Kota Mataram dimekarkan menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Dengan dilakukannya pemekaran ini diharapkan pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat dapat lebih terjangkau, cepat, efektif dan efisien.
3. Sumber daya Aparatur pada tahun 2006 untuk non guru berjumlah 2.356 orang, dengan latar belakang pendidikan, SD 72 orang, SLTP 67 orang, SLTA 897 Orang, DI 69 Orang, DII 4 orang, DIII 207 orang, DIV 42, S1 931 orang, S2 67 orang. Sedangkan PNS guru sebanyak 2.746 orang dengan jenjang pendidikan, SLTA 399 Orang, DI 35 Orang, DII 844 orang, DIII 286 orang, DIV 1.178, S1 4 orang.

2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Kondisi geomorfologi 20 tahun kedepan cenderung tidak berubah terkecuali terjadinya bencana alam, gempa bumi dan tsunami mengingat secara geografis terletak pada jalur rawan bencana (Zona Subduksi lempeng Indo Asia dan Euro Australia).
2. Pada satu sisi, perubahan iklim global akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup kedepan. Sedangkan di sisi lain, beban pembangunan dan aktifitas kegiatan manusia yang semakin meningkat tajam akan memberikan tekanan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Hal tersebut dapat dikurangi dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Pertambahan penduduk yang sangat cepat mempengaruhi daya dukung lahan yang menyebabkan intensitas penggunaan lahan yang berlebihan melampaui daya dukungnya (*land carrying capacity*). Pembangunan fisik kota yang membutuhkan ruang yang cukup besar mempengaruhi kondisi dan kualitas air tanah karena terjadi penutupan daerah tangkapan air (*catchment area*). Penutupan daerah tangkapan air akan berdampak juga pada perubahan hidrogeologi berupa semakin berkurangnya potensi mata air terutama di bagian utara dan tengah kota. Hal ini dapat dicegah bila dalam pelaksanaan pembangunan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang secara spesifik mengatur pemanfaatan ruang kota dan upaya pelestarian lingkungan di daerah tangkapan air.

2.2.2. Demografi

1. Kota Mataram kedepan akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Penurunan angka kelahiran, meningkatnya harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi sebagai akibat semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat.
2. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan merubah komposisi piramida penduduk. Diharapkan 20 tahun kedepan, komposisi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, namun beban pemerintah untuk program sosial seperti bantuan pada lansia semakin besar.

2.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Periode 20 tahun mendatang merupakan era yang penuh persaingan, ketidakpastian sebagai akibat dari globalisasi, penduduk yang semakin banyak, tuntutan kehidupan yang semakin meningkat disertai dengan dinamika perubahan-perubahan pranata sosial yang makin kompleks. Penurunan SDA akan semakin tinggi, eksploitasi SDA semakin tidak terkendali.
2. Pembangunan di masa yang akan datang perlu memperhatikan penataan ruang, pemanfaatan ruang dengan penuh kedisiplinan yang disertai dengan pengawasan yang ketat. Penataan dan implementasi perencanaan tata ruang yang keliru dapat menimbulkan berbagai dampak di beberapa segi, seperti kekumuhan, disparitas pendapatan, dan kesenjangan dalam memperoleh akses dan fasilitas pembangunan yang ada. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak saja didorong oleh akumulasi modal akan tetapi akan didorong juga oleh peningkatan produktivitas sumber daya yang ada dan disertai dengan peningkatan efisiensi kelembagaan ekonomi.
3. Pertumbuhan ekonomi harus didorong lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang cepat memerlukan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian guna menunjang percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Perlu terus diupayakan peningkatan peranan dan kualitas sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang berbasis pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. Perekonomian ditata lebih baik melalui peningkatan mutu dan daya produk yang dihasilkan untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Untuk mendukung kegiatan ini maka stabilitas dan keamanan perlu ditingkatkan melalui perencanaan partisipatif dan komprehensif.
5. Sektor pertanian tetap dijaga keberlanjutannya melalui diversifikasi pola-pola perencanaan dan pelaksanaan kearah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agro industri dan agro bisnis yang dapat berfungsi sebagai daerah hijau Kota, serta termanfaatkannya halaman pekarangan rumah yang kan berfungsi sebagai kawasan hijau kota
6. Untuk mengantisipasi angkatan kerja yang diperkirakan akan terus meningkat, maka perlu diciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta diversifikasi ekonomi baik diversifikasi vertikal maupun diversifikasi horizontal. Dalam kaitannya dengan hal ini maka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan, penguasaan dan penerapan teknologi ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dan efektif, serta

menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pembukaan lapangan kerja baru oleh pemerintah dan swasta terus diupayakan guna mengantisipasi peningkatan angkatan kerja.

7. Pengembangan sektor pariwisata lebih diarahkan pada pengembangan wisata MICE (*Meeting Incentive Conference and Exhibition*) serta daya dukung bagi kawasan wisata Pulau Lombok dan Sumbawa. Pengembangan sektor pariwisata tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat akan tetapi juga memberikan dampak negatif berupa pengaruh budaya asing yang akan mempengaruhi norma-norma kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal ini maka perlu penanaman nilai-nilai agama dan norma-norma yang merupakan anutan masyarakat lokal sebagai daya dukung pengembangan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, harus diupayakan berbagai event-event wisata secara reguler guna meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Mataram.
8. Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya disesuaikan dengan produk Dokumen Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Khususnya untuk kawasan budidaya dengan status kawasan khusus, kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan dan kawasan strategis perlu di legitimasi dan direncanakan untuk mengantisipasi pergeseran peruntukan sesuai RTRW Kota Mataram.

2.2.4 Sosial Budaya dan Politik

1. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia 20 tahun kedepan ditujukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui peningkatan angka harapan hidup, menekan angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melalui peningkatan pemberdayaan perempuan angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatkan paritas daya beli masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dalam tataran nasional Terpenuhinya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama penanganan berbagai permasalahan kesehatan pada lapisan masyarakat bawah. Sehingga terbangun wawasan masyarakat untuk mengedepankan pencegahan penyakit daripada melakukan pengobatan. Membangun kesadaran hidup bersih dan sehat serta ketangguhan atas berbagai penyebaran penyakit sebagai akibat terbukanya akses dari daerah lain. Meningkatnya pemahaman seluruh masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.

2. Semakin meratanya akses layanan pendidikan masyarakat pada semua jenjang pendidikan. Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun yang ditandai dengan tingginya angka rata-rata lama sekolah dan tidak terdapat angka putus sekolah terutama pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. Tidak adanya disparitas taraf pendidikan masyarakat miskin dengan masyarakat menengah keatas. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tuntasnya buta aksara dengan mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap lingkungan untuk memberikan pendidikan bagi penduduk usia 15 tahun keatas yang belum melek aksara. Berkembangnya taman bacaan masyarakat untuk mendorong minat baca dan pengentasan buta aksara, selain meratanya perustakaan sekolah pada semua jenjang pendidikan
3. Terciptanya ketahanan dan kerukunan kehidupan masyarakat yang harmonis, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama sebagai syarat mutlak bagi terselenggaranya kehidupan pemerintahan dan pembangunan yang dinamis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Terciptanya kehidupan politik masyarakat yang demokratis, mandiri dan berkesadaran hukum melalui pendidikan politik, sehingga masyarakat sipil semakin sadar akan hak-hak dan kewajiban politik mereka. Hal tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengembangan urusan-urusan publik.
5. Terciptanya ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan masyarakat untuk terwujudnya kemampuan dan ketahanan baik di tempat pemukiman maupun tempat kerja.

2.2.5. Prasarana dan Sarana

1. Air Bersih
 - a. Terpenuhinya kebutuhan layanan air bersih pada seluruh lapisan masyarakat melalui pelestarian dan melindungi lingkungan di sekitar sumber mata air guna menjamin pemenuhan air bersih untuk kebutuhan perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian daerah.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pelanggan dan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan dan layak *minum (potable water)* dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta maksimalnya pengolahan air permukaan untuk dijadikan sebagai alternatif air bersih.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitar dalam rangka perlindungan kawasan sumber mata air sehingga kondisi air baku tetap lestari dan terjamin serta sudah adanya peraturan dan regulasi yang akan mengatur penggunaan air bawah tanah dengan tertibnya Surat Izin Pengambilan Air Bawah tanah
2. Drainase
- a. Terwujudnya sistem drainase perkotaan yang memiliki interkoneksi dalam rangka menjamin tidak terjadinya banjir dan genangan-genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan landai. Pertumbuhan fisik kota yang sangat pesat sebagai dampak dari eskalasi pertumbuhan ekonomi, yang berpengaruh pada perubahan-perubahan percepatan pertumbuhan penduduk tata guna lahan, dan kondisi topografi wilayah Kota Mataram yang relatif datar, berimplikasi pada sistem drainase perkotaan di tahun-tahun mendatang.
 - b. Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana prasarana pengairan dan drainase kota; serta program Kali Bersih dengan Sungai Bebas sampah.
3. Air Limbah dan Sanitasi
- a. Pembuangan air limbah khususnya untuk industri dan rumah tangga tidak lagi menggunakan saluran yang menyatu dengan saluran drainase yang ada di tingkat lingkungan namun menggunakan saluran pembuangan dan treatment tersendiri sehingga tidak mencemari lingkungan.
 - b. Sistem pengolahan limbah komunal (*of site system*) dapat dioperasikan secara optimal dan menjangkau semua unit rumah, dalam rangka mengatasi persoalan air limbah yang terus meningkat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lini kehidupan masyarakat.
4. Transportasi
- a. Transportasi Darat
 - 1) Terciptanya pola jalan utama dengan pola grid yang disesuaikan dengan morfologi kota serta jaringan jalan yang berfungsi sebagai kolektor primer dan kolektor sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah pembangunan
 - 2) Terbangunnya jaringan jalan *inner ring road* dan *outer ring road* sehingga terbukanya kawasan yang relatif terisolir terutama kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain dan memiliki aksesibilitas yang lebih besar bagi kegiatan kawasan.

- 3) Terciptanya manajemen transportasi perkotaan yang mendukung perkembangan kota dan mampu mengantisipasi peningkatan jumlah sarana transportasi.
- 4) Moda transportasi dapat melayani dan menjangkau seluruh wilayah dalam kota dan wilayah pendukungnya dengan kualitas layanan yang memadai.
- 5) Meningkatnya kualitas terminal regional dan terminal lokal untuk menunjang pergerakan barang dan mobilitas orang ke seluruh wilayah kota.

b. Transportasi Laut

Terbangunnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam rangka menampung hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir Ampenan dan sekitarnya serta menunjang pengembangan sektor perikanan Provinsi NTB. Pelabuhan pariwisata dalam rangka memperpendek jarak tempuh penyeberangan antara Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata utama ke Pulau Lombok yang merupakan potensi destinasi pariwisata alternatif. Pembangunan dermaga tersebut nantinya secara tidak langsung dapat memperbaiki perekonomian nelayan khususnya dan sebagai perangsang terhadap perkembangan dan perbaikan sumber perekonomian daerah pada umumnya, baik di Kota Mataram maupun di Provinsi NTB.

c. Transportasi Udara

Kondisi Bandar Udara Selaparang ditingkatkan menjadi bandara yang dapat melayani route luar negeri yaitu dengan memperpanjang *runaway* landasan pacu ke arah barat dan ke arah timur dan pelebaran *runaway*. Keberadaan bandar udara Selaparang akan dapat mempercepat akses dalam berinteraksi antara daerah atau wilayah yang satu ke wilayah yang lain termasuk dengan Negara-negara lain yang akan membawa dampak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

5. Prasarana dan Sarana Irigasi

- a. Terlaksananya pengelolaan sumber daya air lebih efisien, efektif dan terpadu agar dapat diwujudkan keseimbangan antara ketersediaan air secara kualitas maupun kuantitas serta menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya air.
- b. Meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi, khususnya pemeliharaan dan keterpaduan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air di 4 (empat) sungai yang ada.

6. Kelistrikan

Tersedianya daya listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang dan sangat mengedepankan penggunaan energi listrik. Walaupun diakui bahwa manajemen pengelolaan kelistrikan di luar kewenangan pemerintah daerah namun demikian tetap mendukung upaya ketersediaan listrik oleh PLN kepada masyarakat.

7. Telekomunikasi

Pembangunan pertelekomunikasian akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses telekomunikasi. Di samping itu, secara bertahap dalam 20 tahun kedepan akan ditingkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telekomunikasi masyarakat pengguna jasa. Ke depan sebaiknya masyarakat menggunakan telepon *wireless* karena lebih *mobile* dan *fleksibel* dan relatif lebih murah, sedangkan untuk telepon kabel kedepan cenderung untuk penyajian data dan internet dengan kapasitas besar.

8. Permukiman

- a. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih dalam rangka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Dimana telah tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyehatan lingkungan permukiman melalui pembuatan MCK dan sanitasi, saluran limbah rumah tangga, instalasi pengelolaan lumpur tinja dan alat-alat kebersihan dengan sasaran utama kawasan permukiman kumuh.
- b. Tersedianya Rumah Sehat dan Layak Huni pada tahun 2025 dengan sistem sanitasi lingkungan yang baik.

9. Persampahan

- a. Terwujudnya sistem pengelolaan sampah dengan skala terpadu pada tiap kawasan dalam rangka menjamin pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan.
- b. Terwujudnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah dan peran institusi kemasyarakatan pengelola kebersihan di tingkat lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mencapai *zero waste* dengan menerapkan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- c. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten sekitar serta kerjasama dengan swasta dapat dilakukan terutama dalam pengembangan pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Regional.

10. Fasilitas Kesehatan
Tersedianya fasilitas kesehatan meliputi RSUD, balai pengobatan, apotek, BKIA & RS bersalin dan puskesmas rawat inap dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas
11. Fasilitas Pendidikan
 - a. Tersedianya fasilitas pendidikan untuk semua jenjang pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi serta Tersedianya tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan bid. Keahlian dan pendidikannya.
 - b. Tersedianya pusat-pusat pendidikan formal dan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat melayani masyarakat.

2.2.6. Pemerintahan

Tertatanya administrasi pemerintahan lokal, manajemen publik dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi demokratisasi dan globalisasi agar mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan kualitas prima. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengawasan dalam rangka terciptanya *good local governance*.



VISI, MISI, DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi Kota Mataram 2005- 2025

Berdasarkan analisa terhadap kondisi umum Kota Mataram saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki maka Visi pembangunan Kota Mataram tahun 2005-2025 adalah :

Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025

Visi pembangunan Kota Mataram ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu makna yang terkandung dalam visi Kota Mataram tersebut adalah :

Religius adalah Pembangunan masyarakat bermoral untuk memantapkan fungsi dan peran norma/nilai-nilai kearifan lokal serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Maju dan Berbudaya adalah kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi IPTEK. pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain dengan mengedepankan karakter masyarakat Kota Mataram dan sistem sosial yang berakar dari nilai/norma yang berlaku yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai prasyarat (*pre-requisite*) dalam meraih kemakmuran (*prosperity*).

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa adalah percepatan dan pematapan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai ibu kota provinsi Kota Mataram berupaya memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana perasaran yang mendukung sebagai pusat pemerintahan di NTB.

3.2. Misi Kota Mataram 2005 – 2025

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Mataram tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika** adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki kebanggaan sebagai warga *Gumi Mentaram* dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.
2. **Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum** adalah pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya untuk ikut serta dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan manusia, dalam rangka mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. **Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Yang mengedepankan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah yang didukung oleh SDM yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. **Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Era Globalisasi** adalah membangun kemampuan dan kekuatan yang berasal dari potensi daerah sendiri untuk dapat bebas menentukan nasib sejajar dan sederajat dengan daerah yang lebih maju melalui penguasaan dan pemanfaatan IPTEK; memperkuat

perkonomian berbasis keunggulan lokal; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

5. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat .
6. **Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** adalah membangun kemampuan diri dalam upaya optimalisasi manajemen keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah;
7. **Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan** adalah mengembangkan model pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya buatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.

3.3. Sasaran, Arah, Strategi Pembangunan (Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang)

3.3.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Mataram tahun 2005–2025 adalah **Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025** sebagai landasan bagi tahap pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran terwujudnya **Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025** pembangunan dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok melalui misi pembangunan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya karakter masyarakat kota Mataram yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dicirikan oleh watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi IPTEK dan taat pada tataran norma dan adat istiadat serta peraturan yang berlaku.
 - b. Mantapnya budaya lokal yang tercermin dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya guna menguatnya jati diri.
2. **Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yakni penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan anak dan remaja, serta aspek terkait lainnya.
 - c. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan publik dalam lingkup kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. **Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Terciptanya sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental.
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal.
 - d. Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

- e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek.
- f. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan.
- g. Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi di bidang ekonomi sebagai akibat dari perkembangan di bidang komunikasi, transformasi dan teknologi produksi.
- h. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan disegala bidang sebagai penerima tongkat estafet pembangunan.

4. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Era Globalisasi ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2027 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah lain yang berpenghasilan menengah atas, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang secara umum ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, mendorong industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- e. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan.

5. **Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :**
 - a. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
 - b. Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;
 - c. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
 - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
 - e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

6. **Mantapnya pengelolaan potensi dan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif efisien, responsive, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
 - c. Tersedianya sistem informasi aset daerah secara *actual* dan *online*

7. **Tergali dan termanfaatkannya potensi SDA berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berkembangnya pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan; terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.
 - b. Meningkatnya akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

3.3.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika**
 - a. Pembangunan masyarakat bermoral diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran norma/nilai-nilai kearifan lokal serta agama sebagai landasan

moral dan etika dalam pembangunan, membina Masyarakat Bermoral, Berbudaya, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan moral diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

- b. Pembangunan dan pemantapan Masyarakat Bermoral, Berbudaya Dan Berkesadaran Hukum ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar, dari nilai/norma yang berlaku. Masyarakat Bermoral, Berbudaya merupakan kombinasi antara nilai-nilai seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan Masyarakat Bermoral, Berbudaya tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.
- c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kota Mataram mampu menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

2. Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek ekonomi, memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial budaya memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yakni penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan,

pemberdayaan keluarga, pemberdayaan anak dan remaja, serta aspek terkait lainnya.

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek politik memiliki makna penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan publik dalam lingkup kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan hidup, yang memiliki makna meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ

- a. Peningkatan kualitas SDM yang menguasai teknologi ditujukan untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Hal ini disebabkan karena teknologi sangat erat terkait dengan budaya dan sistem politik secara umum (termasuk politik ekonomi), karena teknologi akan berdampak positif bagi perekonomian suatu daerah manakala unsur-unsurnya saling menunjang satu sama lain (*compatible*), dan pelaksanaannya sangat didukung secara substansial (bukan hanya secara legal) oleh *political power*.
- b. Hadirnya teknologi dalam kehidupan masyarakat memungkinkan peningkatan kemampuan berproduksi dan peningkatan taraf kehidupan dalam masyarakat itu. Ini berlaku bagi setiap manusia yang bermasyarakat, di kota Mataram, daerah lainnya bahkan luar negeri. Kunci kesemuanya ini adalah kemampuan mendapatkan serta mengembangkan teknologi. Tanpa kemampuan ini, pemilihan sumber daya alam yang berlimpah-limpahpun tidak akan merupakan harta yang dikuasai. Sedangkan dengan dikuasainya ilmu pengetahuan dan teknologi, langkanya sumberdaya alam tidaklah akan merupakan hambatan yang tidak teratasi.
- c. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan prasyarat (*pre-requisite*) dalam meraih kemakmuran (*prosperity*). Teknologi, dalam kancah perekonomian global sudah dianggap sebagai investasi (*capital*) dominan dalam pembangunan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam bukan lagi penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah. Daerah yang mampu menguasai teknologi akan mampu bersaing dengan daerah lainnya yang

mempunyai sumber daya alam yang besar tetapi tidak menguasai teknologi. Oleh karena itu, membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) sangat diperlukan dalam mendorong pembangunan suatu daerah.

- d. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM).

4. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Era Globalisasi

Kemampuan daerah untuk berdaya saing dengan daerah lain adalah kunci bagi tercapainya kemajuan pembangunan. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kota Mataram siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing dalam jangka panjang diarahkan untuk:

- a. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain. Dalam kaitan itu, pembangunan

sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.

- Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- b. Memperkuat perekonomian domestik berbasis potensi lokal di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri;
- Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian kerakyatan yang berdaya saing. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif.
 - Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi yang memerhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
 - Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi

nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).

- Memperkuat Struktur perekonomian dengan mendudukkan = industri kerajinan, industri kecil dan menengah yang sehat dan berkeadilan, serta mendorong perkembangan ekonomi dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang efisien, modern, dan berkelanjutan.
 - Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa.
 - Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
 - Pengembangan sarana pendukung kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan nilai jual daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keunggulan kota mataram sebagai pintu gerbang para wisatawan ke pulau lombok dan sumbawa
- c Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan;
- Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika,

kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek,

d Membangun infrastruktur yang maju;

- Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk (a) menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, (b) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengonsumsi air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan kabupaten disekitar Kota Mataram tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar pola pengelolaan yang lebih berkeadilan dapat tercapai. Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatan terpadu (*conjunctive use*) antara air permukaan dan air tanah akan

digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.

- e Melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
- Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).
 - Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

5. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat melalui berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; Terciptanya sistem pemerintahan

dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

- c. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

6. Memantapkan Pengelolaan Potensi Dan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel

- a. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar mengelolanya sesuai dengan praktik terbaik (*the best practice*), yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, pengentasan kemiskinan.
- b. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan terutama BPR, LKP maupun Koperasi.
- c. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan. Sementara itu sumber pendapatan dari PAD terus ditingkatkan efektivitasnya.
- d. Pembiayaan pembangunan adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

7. Tergali dan termanfaatkannya potensi SDA berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan

Interaksi antardaerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Investasi diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

3.3.3. Strategi Pembangunan (Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang)

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

3.3.3.1. Pembangunan lima tahun pertama (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan lima tahun pertama diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, Peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah, swasta dan masyarakat, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, penataan supra struktur dan infra struktur pemerintahan, Perwujudan prinsip-prinsip

tata pemerintahan yang baik *good governance*, penataan dan pembinaan kependudukan, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), pelayanan kesehatan dan pelayanan KB, pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat, penataan kawasan pemukiman & pelestarian lingkungan hidup, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pendapatan & pembinaan usaha ekonomi sektor informal serta perlindungan konsumen.

Berlandaskan arah pembangunan tersebut dirumuskan 3 (tiga) program unggulan (*Leading Programs*) yaitu

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dilakukan dengan berbagai upaya yang bermuara pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk miskin sehingga memiliki sumber pendapatan. Penciptaan lapangan pekerjaan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, artinya basis pengembangan usaha ekonomi produktif harus memiliki akar kultural yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan koperasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan standar serta kualitas yang memadai.
- Meningkatnya penguasaan teknologi, manajemen dan ketrampilan industri kecil, menengah dan koperasi untuk mencapai kemandirian usaha.
- Terciptanya keberdayaan dan kemandirian koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro.
- Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat sehingga mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatnya kemampuan dan kemandirian ekonomi produktif masyarakat pesisir dan nelayan yang ditunjang pembangunan dermaga perikanan melalui pendayagunaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam rangka penciptaan nilai tambah hasil perikanan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dengan daerah lain yang ditandai dengan

- Meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah, APM dan APS.
- Meningkatnya derajat kualitas masyarakat dan usia harapan hidup, dengan menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan daya dukung, kapasitas, kualitas pelayanan prasarana jalan kota dalam menunjang percepatan pergerakan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan :
 - Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum melalui dukungan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi.
 - Peningkatan pelayanan sarana pendukung penyehatan lingkungan permukiman, pelayanan penanggulangan kebakaran dan kebersihan kota.
 - Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan distribusi pelayanan air bersih di wilayah perkotaan.
 - Terwujudnya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lahan yang tersedia.
 - Terwujudnya penataan ruang Terbuka Hijau perkotaan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang penciptaan keserasian lingkungan.

3.3.3.2. Pembangunan lima tahun kedua (2010– 2014)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun pertama maka prioritas pembangunan lima tahun kedua diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung dengan membaiknya kondisi makro dan mikro ekonomi. Meningkatnya kualitas SDM ditujukan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu untuk pendidikan dasar dan menengah 12 tahun, *education for all* atau pendidikan untuk semua dan penguasaan teknologi. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, (pelayanan kepada penyandang cacat), rehabilitasi pemakai narkoba (NAPZA), meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang sejajar dengan daerah yang lebih maju. Semakin mantapnya pemahaman dan penegakan aturan hukum, terpeliharanya kerukunan internal dan antar umat beragama dan antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki kebanggaan sebagai (warga Kota Mataram) *Gumi Mentaram* sebagai modal pembangunan.

Daya saing perekonomian meningkat melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dengan memperkuat ekonomi lokal berbasis keunggulan wilayah (dengan membantu permodalan dan peningkatan sumber daya manusia) menuju keunggulan

kompetitif yang mendukung sektor perdagangan dan jasa dalam menghadapi era globalisasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa secara terpadu, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat; meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; meningkatnya iklim persaingan usaha; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung daya saing melalui penguasaan dan penerapannya secara luas dalam sistem produksi barang dan jasa.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang (dengan mengacu pada perda NTB No 11/2006 tentang tata ruang propinsi NTB) ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan orang dan barang serta menggerakkan perekonomian baik skala kecil, menengah dan besar; terpenuhinya sarana prasarana permukiman yang bersih dan sehat guna peningkatan kualitas derajat kesehatan; meningkatnya aksesibilitas pelayanan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga ketersediaan penyediaan air minum yang diikuti dengan pembangunan prasarana sumber daya air untuk dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; (Penataan urbanisasi dengan menekankan pada ciri kota metropolis).

3.3.3.3. Pembangunan lima tahun ketiga (2015– 2019)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun kedua maka prioritas pembangunan lima tahun ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman; tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga

dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air; optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan; meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kesejahteraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya yang didukung dengan tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental; meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal; membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (good governance) yang mampu mendukung pembangunan.

Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan

ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi; meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatnya pendapatan perkapita dan rendahnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).

3.3.3.4. Pembangunan lima tahun keempat (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan lima tahun ketiga, pembangunan lima tahun keempat ditujukan untuk mewujudkan Kota Mataram Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya, Maju dan Religius Tahun 2025 melalui percepatan dan pemantapan pembangunan disegala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat ditunjukkan dengan makin tinggi dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efektif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek; meningkatnya derajat kesehatan, (pelayanan kesehatan dan KB) dan status gizi masyarakat; terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sejalan dengan tingkat kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/ norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi IPTEK.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan

meningkatnya keberdayaan dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik; terciptanya kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi ini ditunjang dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah lain yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien yang menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

Pengelolaan potensi sumber daya alam yang dikelola dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan makin berkembang ditandai dengan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan lingkungan hidup serta meningkatnya kesadaran dan kecintaan masyarakat akan arti penting lingkungan hidup. Kondisi maju makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan perhubungan, pos dan telematika yang handal. Selain itu didukung pula dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan terciptanya sumber daya aparatur serta sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, profesional, bertanggung jawab, (berakhlak dan berbudi luhur) dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel; makin mantapnya pengelolaan potensi dan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; makin mantapnya peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005–2025 yang berisi tinjauan umum kondisi Daerah, visi, misi, dan arah pembangunan adalah merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Mataram dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun ke depan. RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Kota Mataram Tahun 2005–2025, Pemerintah Daerah wajib menerapkan 4 prinsip utama **Good Governance** yang meliputi:

1. **Akuntabilitas**, berarti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. **Transparansi**, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam proses perumusan kebijakan publik dan tindakan pelaksanaannya. Dengan kata lain segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Pemerintahan yang baik yang bersifat transparan dan terbuka akan memberikan informasi/data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.
3. **Partisipasi**, menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan dan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan.

RPJP Kota Mataram Tahun 2005–2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kota Mataram Tahun 2005–2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota Mataram berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kota Mataram Tahun 2005–2025 ke dalam RPJM Daerah Kota Mataram yang memuat visi dan misi Walikota Mataram, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok

- pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Mataram berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
 4. Pihak eksekutif dan legislatif Kota Mataram serta seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005–2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Mataram.

WALIKOTA MATARAM,

Ttd

H. MOH. RUSLAN

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM**

Ttd

H. L. MAKMUR SAID